

**PERUBAHAN SOSIAL DI KELURAHAN SARI BUNGAMAS
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2007-2013
(SUMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN
SEJARAH KELAS IX
MADRASAH TSANAWIYAH SABILUL MUTTAQIN)**

Chusnuul Adam, Alian Sair, Supriyanto

Program Studi Pendidikan Sejarah

FKIP Universitas Sriwijaya

Email: chus.adam@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Perubahan Sosial di Kelurahan Sari Bungamas Kabupaten Lahat Tahun 2007-2013” dengan rumusan masalah mengenai bagaimanakah perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Sari Bungamas, hal apakah yang mendorong perubahan sosial tersebut dan bagaimanakah pengaruh adanya perubahan struktur pemerintahan terhadap kondisi perekonomian, pendidikan dan kondisi politik masyarakat di Kelurahan Sari Bungamas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Sari Bungamas dalam kurun waktu mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah yang dilakukan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan dari berbagai ilmu sosial seperti, sosiologi, antropologi dan ekonomi. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial di Kelurahan Sari Bungamas terjadi dalam sistem pemerintahannya, dimana sistem pemerintahan awal menggunakan sistem pemerintahan desa, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan kelurahan pada tahun 2007. Perubahan ini didorong oleh karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang relatif maju, toleransi, penduduk yang heterogen, dan karena adanya orientasi masa depan. Perubahan sosial tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur pemerintahan, kondisi perekonomian, kondisi pendidikan dan kondisi politik masyarakatnya baik yang bersifat positif maupun negatif.

Kata Kunci : Perubahan Sosial, Kelurahan, Kabupaten Lahat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dimana pada saat ini sedang menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan taraf hidup bangsa

Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana umum meliputi pembangunan industri, perhubungan, perekonomian, dan perubahan terhadap struktur pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di

Indonesia, peranan dari pemerintah sangat penting dan sudah direncanakan sebelumnya agar tercapai kesejahteraan yang merata dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya program pembangunan maka dapat dipastikan berbagai perubahan dapat terjadi. Dalam konsepnya, perubahan dapat mencakup berbagai macam aspek kehidupan yang dipengaruhi seperti, lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, serta sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat (Soemardjan, 1981:xxiv).

Dalam membangun suatu pemerintahan berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan ahli di bidangnya, yang lebih penting adalah kerjasama antara perangkat pemerintahan dengan masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan merupakan salah satu agenda pokok yang tidak terpisahkan dari otonomi daerah. Sebab otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mandiri dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, profesional dan yang mampu menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan sistem pemerintahan merupakan sarana untuk membuat sistem administrasi menjadi lebih baik untuk menciptakan persamaan politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pola kehidupan masyarakat kelurahan dalam daerah perkotaan yang terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang tetapi tetap

terikat dalam batas hak dan kewajiban yang jelas (*gesellschaft*) sehingga koordinasi pemerintahannya menjadi mudah dilakukan. Sedangkan sebagai sebuah proses, perubahan sistem pemerintahan dapat dilihat sebagai berubahnya praktik-praktik, tingkah laku, dan struktur pemerintahan yang telah mapan sebelumnya dalam sistem pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan desa, hubungan kemasyarakatannya berakar dari kehidupan yang asli, kekeluargaan, paguyuban, kepemilikan dan kerja bersama (*gemeinschaft*). Contohnya dalam membuat rumah di desa dilakukan secara bergotong royong, demikian juga dalam bercocok tanam di sawah dan panennya-pun dilakukan secara bergotong royong. Sedangkan masyarakat kelurahan dalam perkotaan dilakukan sebaliknya.

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan secara struktural, fungsional, maupun kultural. Perubahan paradigma dari pemerintah ke tata kelola pemerintahan menuntut perubahan *mind-set* (pola berpikir) dan arah pemerintahan yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik atau melayani masyarakat. Ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Diantaranya, memberi ruang kepada lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lembaga pemerintah dengan non-pemerintah yaitu masyarakat sipil.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pemerintah Kabupaten Lahat sebagai daerah yang ingin terus membangun dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerahnya, terutama dalam melayani kepentingan masyarakat, maka dirumuskan misi dan tujuannya yaitu: “Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan aparatur dan kelembagaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan strategis daerah”. Tentu saja untuk mewujudkan misi tersebut maka pemerintah Kota Lahat perlu melakukan upaya untuk mewujudkannya (<http://www.lahatkab.go.id/statis-26-visidanmisi.html> diakses pada hari Jumat 3 Januari 2014 pukul 20.00).

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah meletakkan pemerintahan desa sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat dari posisi strategis pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk dan adat istiadat yang berlaku. Hal ini mengandung maksud bahwa pemberian wewenang pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dalam kehidupan masyarakat desa (Siagian, 2003:147).

Kebijakan “Otonomi Daerah” (OTDA) sebagaimana gagasannya tertuang pada Undang-undang (UU) no.22/1999 dan revisinya pada UU no 32/2004 tentang “pemerintah daerah” menjadi salah satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (*governance system*) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintahan secara nasional (Dharmawan, 2006 :1).

Gagasan di atas rupanya mempunyai kecenderungan untuk menyarankan bahwa suatu pembangunan masyarakat desa akan lebih berhasil bilamana di dalam pelaksanaannya struktur kekuatan politik tidak resmi di dalam masyarakat tersebut bisa diarahkan secara efektif (Alfian, 1986:60).

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan. Penetapan status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah. Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menuntut adanya perubahan perangkat. Hal ini dikarenakan kedua sistem pemerintahan tersebut, walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda. Dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan dalam konteks pemerintah daerah dan kelurahan lahirnya peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan peraturan daerah Kabupaten Lahat nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi, tata kerja kecamatan dan kelurahan merupakan sebuah keinginan pemerintah dalam rangka merespon kepentingan pelayanan masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan, termasuk di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Posisi dan letak desa yang strategis, mengundang banyak masyarakat pendatang, hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat desa.

Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan sebuah jaminan dan dukungan bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Alasan menjadikan Kelurahan Sari Bungamas sebagai tempat dilakukannya penelitian yaitu dikarenakan Kelurahan Sari Bungamas merupakan satu-satunya wilayah eks-transmigrasi yang dilakukan pemekaran wilayahnya dari sistem pemerintahan desa berubah menjadi kelurahan di Kabupaten Lahat. Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan dan pola kehidupan masyarakat Kelurahan Sari Bungamas dan sekitarnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai sejarah lokal bagi siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin guna menambah wawasan mereka terhadap berbagai perubahan yang telah terjadi di lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Sari Bungamas.

Pembahasan

a. Perubahan Sosial di Kelurahan Sari Bungamas

Struktur sosial yang mengalami perubahan di dalam kelurahan Sari Bungamas adalah susunan struktur pemerintahannya. Struktur pemerintahan yang ada di Kelurahan Sari Bungamas pada awalnya merupakan sistem pemerintahan desa yang kemudian pada tahun 2007 menjadi sistem pemerintahan kelurahan. Perbedaan antara kedua sistem pemerintahan tersebut sangat mencolok, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya.

1. Sistem Pemerintahan Kelurahan Sari Bungamas

Sepanjang sejarah berdirinya Kelurahan Sari Bungamas hingga sekarang, telah terjadi perubahan sistem di dalam susunan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan awal berdirinya yang berbentuk sistem pemerintahan desa (sebelum tahun 2007) hingga menjadi sistem pemerintahan kelurahan (setelah tahun 2007). Perubahan yang sangat jelas terlihat adanya perbedaan dalam struktur pemerintahannya, dimana pada awalnya berupa sistem pemerintahan desa yang dikepalai dan dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkatnya yang dipilih oleh masyarakat Desa Sari Bungamas dan kemudian menjadi sistem pemerintahan kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah dengan berbagai perangkatnya yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Lahat.

a) Sebelum Terjadinya Perubahan Sistem Pemerintahan

Menurut Hartawan (2014) sistem pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas sebelum tahun 2007 masih menggunakan sistem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa ini dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh beberapa perangkatnya seperti, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, kepala RW dan RT dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dari perangkat desa tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dalam mengemban amanah yang telah diberikan.

b) Sesudah Terjadinya Perubahan Sistem Pemerintahan

Perubahan sistem pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas terjadi setelah diresmikan perombakan struktur pemerintahan atas SK Bupati yang dilakukan pada pertengahan bulan Juli pada tahun 2007. Dengan adanya perombakan struktur pemerintahan tersebut maka, struktur pemerintahan desa yang ada selama ini tidak digunakan lagi. Walaupun dalam segi struktur pemerintahannya tidak terlalu berbeda dengan sistem selama ini, hanya saja jabatan Kadus yang dihilangkan sedangkan perangkat-perangkat pemerintahan lainnya tetap dipertahankan seperti RW dan RT masih tetap ada. Hal yang membedakan dengan jelas dari sebelumnya yaitu para perangkat kelurahan merupakan orang-orang dari pemerintah kabupaten yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c) Proses Perubahan Status Desa Sari Bungamas Menjadi Kelurahan

Adapun proses penetapan Desa Sari Bungamas menjadi kelurahan, yaitu setelah adanya kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi

kelurahan kemudian masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa pada tahun 2005. Selanjutnya BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesimpulan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Setelah itu, kepala desa mengajukan usul perubahan status menjadi Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD (wawancara dengan Hartawan, 14 April 2014).

d) Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perubahan Sosial di Kelurahan Sari Bungamas

Dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu terjadi interaksi antara penduduk yang satu dengan yang lainnya, antar kelompok dengan kelompok lainnya tentu akan terus berproses secara berkesinambungan tentu dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di Kelurahan Sari Bungamas yaitu sebagai berikut:

1. Kontak Dengan Kebudayaan Masyarakat Sekitar

Sebagaimana diketahui bahwa letak Kelurahan Sari Bungamas yang berjarak 8,2 Km dari Kota Lahat tentu sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian Kabupaten Lahat. Dengan kondisi geografis yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan perekonomian tersebut maka secara langsung akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Kelurahan Sari Bungamas.

Hal ini dikarenakan dengan jarak yang begitu dekat tersebut akan membuka peluang masyarakat Kelurahan Sari Bungamas melakukan kontak dan berinteraksi dengan masyarakat daerah lain terutama dari Kota Lahat. Dengan adanya kontak dan interaksi antar masyarakat, maka akan mulai masuk unsur-unsur baru yang akan memperkaya kebudayaan masyarakatnya terutama dalam bidang teknologi dan taraf hidup menjadi lebih baik.

2. Sistem Pendidikan Formal yang Maju

Letak Kelurahan Sari Bungamas yang cukup dekat dengan Kota Lahat membuat masyarakatnya dapat dengan mudah dalam mengakses pendidikan formal yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah yang cukup banyak anak-anak dari penduduk Kelurahan Sari Bungamas yang menempuh pendidikan di Kota Lahat, seperti di SMP, SMA, SMK ternama di Kabupaten Lahat. Selain itu, di Kelurahan Sari Bungamas sendiri sudah ada sekolah dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) tetapi pada tahun 2013 Madrasah Aliyahnya ditutup karena tidak ada siswanya. Hal ini dikarenakan setelah anak-anak penduduk di Kelurahan Sari Bungamas menempuh pendidikan dasarnya kemudian dilanjutkan ke Kota Lahat, dimana akses menuju Kota Lahat sendiri mudah ditempuh menggunakan kendaraan Sepeda Motor.

3. Toleransi Terhadap Norma-Norma diluar Kebiasaan

Adanya sikap toleransi terhadap norma-norma diluar kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakatnya (tetapi bukan penyimpangan dalam arti pelanggaran hukum) menyebabkan masyarakat memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari kebiasaan yang ada, sehingga terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti toleransi terhadap warga masyarakat yang tidak lagi melaksanakan kebiasaan masyarakatnya karena menganggap kebiasaan tersebut kurang rasional atau tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, serta menggantinya dengan bentuk kebiasaan baru yang diikuti oleh berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang baru pula. Sekarang ini semakin banyak warga masyarakat yang pada saat melakukan acara Mitoni (tujuh bulanan) usia kandungan, tidak lagi melakukan upacara-upacara ritual seperti dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, namun cukup dengan acara pengajian dan doa.

4. Penduduk yang Heterogen

Kelurahan Sari Bungamas merupakan suatu kelurahan yang memiliki latar belakang penduduknya yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan pada awalnya Kelurahan Sari Bungamas merupakan desa transmigrasi binaan Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk yang mayoritas merupakan transmigran dari berbagai daerah dari Pulau Jawa. Karena mereka berasal dari daerah yang berbeda, cenderung berperilaku sesuai budaya asalnya masing-masing, maka sering terjadi ketidakcocokan di antara mereka karena

menganut nilai dan norma yang berbeda. Akan tetapi dengan adanya interaksi yang terjadi secara terus menerus dan adanya toleransi di dalamnya maka terbentuklah perpaduan nilai-nilai dan budaya yang dapat diterima oleh bersama (wawancara dengan Abdul Mukhyar, 13 April 2014).

5. Orientasi Masa Depan

Dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kelurahan Sari Bungamas maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya, selain itu sarana pendidikan yang mudah didapatkan juga turut berperan dalam merubah pola pikir masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keinginan para orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Pengaruh Perubahan Sistem Pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas

Perubahan sistem pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Proses perubahan itu selalu berjalan dengan cepat yang turut mempengaruhi berbagai bidang serta kondisi masyarakat. Dari berbagai bidang kehidupan yang turut dipengaruhi dengan terjadinya perubahan itu diantaranya; kondisi perekonomian, kondisi pendidikan dan kondisi politik, pelayanan publik dan kondisi kesehatan didalam masyarakat yang bersangkutan. Jika dilihat dari sifatnya, pengaruh dari perubahan sistem pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas membawa pengaruh yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengaruh Positif

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, dampak positif merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif atau hal yang baik. Dengan adanya perubahan sosial dalam struktur pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas tentunya ada yang berdampak positif dalam kehidupan masyarakatnya. Dampak positif ini tentunya membuat kehidupan masyarakat Kelurahan Sari Bungamas ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

a) Kondisi Perekonomian

Kehidupan perekonomian masyarakat Sari Bungamas semakin membaik setelah tahun 2007, dimana sistem pemerintahannya dirubah menjadi sistem pemerintahan kelurahan dari sebelumnya berupa sistem pemerintahan desa. Dengan adanya perubahan tersebut peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan berbagai pembangunan sarana publik di Kelurahan Sari Bungamas seperti pembangunan jalan beraspal, masuk jaringan listrik PLN, pembangunan sarana olahraga seperti padepokan dan lapangan bola kaki dan sebagainya. Membaiknya kehidupan perekonomian masyarakat yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang meningkat tajam, maka daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan. Sehingga masyarakat mulai memperbaiki taraf hidupnya dengan melakukan pembangunan rumahnya secara permanen, memcicil kendaraan pribadi, peralatan elektronik dan kebutuhan hidup lainnya. Perlahan tapi pasti, pola hidup masyarakat mulai berubah dengan adanya peningkatan taraf hidupnya, menyebabkan masyarakat menyatu dalam arus globalisasi

yang diperoleh dari akses tak terbatas dari luar kehidupan masyarakat itu sendiri.

b) Kondisi Pendidikan

Untuk mensukseskan program pemerintah wajib belajar 12 tahun maka dibangun sekolah setara dengan SMP dan SMA yaitu MTs Sabilul Muttaqin dibawah naungan Departemen Agama Kabupaten Lahat. Peran peningkatan perekonomian (pendapatan) masyarakat turut mempengaruhi kondisi pendidikan di Kelurahan Sari Bungamas menjadi lebih baik.

c) Kondisi Politik

Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sari Bungamas bersifat sukarela yaitu berupa dukungan masyarakat terhadap berbagai kegiatan-kegiatan politik selama kegiatan dan kebijakan tersebut dianggap baik dan tidak merugikan masyarakat banyak pada umumnya (wawancara dengan Ahmad Shobar Lestari, 14 April 2014).

d) Pelayanan Publik

Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Hal ini dilatarbelakangi perkembangan yang cukup pesat di Kelurahan Sari Bungamas, baik dalam segi perekonomian maupun jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya ditunjang lagi dengan letak geografis yang cukup strategis. Dengan perkembangan tersebut maka sangat penting dilakukan pembenahan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

e) Kondisi Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan Sari Bungamas semakin

meningkat seiring tuntutan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan pelayanan yang sudah cukup memadai dan buka setiap hari sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya. Selain itu apabila masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan di luar jam kerja, Mantri dan Bidan kelurahan siap memberikan pelayanan kesehatan dengan mendatangi rumah penduduk yang sedang membutuhkan bantuan kesehatan tersebut.

2. Pengaruh Negatif

Perubahan sosial dalam struktur pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas tidak selalu mengakibatkan pengaruh yang positif, tetapi juga turut memberikan pengaruh yang bersifat negatif. Pengaruh negatif muncul ini secara perlahan menggerus dan merubah kehidupan masyarakat dari pola semula. Adapun Pengaruh negatif yang terjadi akibat adanya perubahan sistem pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas yaitu:

a) Menurunnya Budaya Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat

Kegiatan gotong royong semakin jarang dilakukan di dalam masyarakat Kelurahan Sari Bungamas. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakatnya maka masyarakat lebih cenderung memberi upah atau bayaran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini menjadikan masyarakat lebih bersifat individualis dan kurang mempunyai rasa solidaritas di antara sesamanya lagi (wawancara dengan Kasmali, 13 April 2014).

d. Sumbangan Materi Pembelajaran Sejarah Lokal Siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin.

Dalam rangka menambah khasanah materi pembelajaran sejarah, penulis berharap setelah tulisan ini disampaikan dalam kegiatan pembelajaran maka siswa dapat mengetahui perubahan sosial yang terjadi di tempat tinggalnya yaitu, perubahan dalam struktur pemerintahannya yang menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Sari Bungamas.

PENUTUP

1. Berbagai perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Sari Bungamas diantaranya adalah perubahan susunan struktur pemerintahannya. Struktur pemerintahan yang ada di Kelurahan Sari Bungamas pada awalnya merupakan sistem pemerintahan desa yang kemudian pada tahun 2007 menjadi sistem pemerintahan kelurahan. Dengan adanya perubahan struktur pemerintahan tersebut maka komponen-komponen pemerintahan yang ada didalamnya juga mengalami perubahan yang cukup jelas.
2. Hal yang mendorong terjadinya perubahan sosial di Kelurahan Sari Bungamas yaitu karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi, penduduk yang heterogen, dan orientasi masa depan yang kemudian akan menyatu dalam sebuah ikatan kekeluargaan (paguyuban) atau dalam kepentingan

golongan (Gemeinschaft dan Gessellschaft).

3. Adapun pengaruh perubahan sistem pemerintahan di Kelurahan Sari Bungamas menimbulkan 2 pengaruh yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif meliputi; kondisi perekonomian, kondisi pendidikan, kondisi politik, pelayanan publik dan kondisi kesehatan masyarakat. Sedangkan pengaruh yang bersifat negatif yaitu: menurunnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Penerapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alfian. 1986. *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : UI-Press.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Antlov, Hans. 2003. *Negara Dalam Desa*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Beratha, I.Nyoman. 1992. *Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik-Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Daliman. A. 2011. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Daldjoeni, N. 1979. *Perubahan Sosial dan Tanggapan Manusia*. Alumni: Bandung.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. *Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan* : Bogor: IPB.
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Desa*. Surabaya : CV Usaha Nasional
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan : Nugroho Notosusanto. Jakarta: Penerbit UI .
- Haviland, William A. 1985. *Anthropology 4th Edition*. Jakarta : Erlangga.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung : Refika Aditama.
- Irwanto, Dedi & Alian Sair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Kuntowijoyo. 1996. *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua*. Jogjakarta: Tiara Wacana.
- Marzuki. 2004. *Metodologi Sejarah Dan Historiografi*. Palembang: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.
- Mannheim, Karl. 1987. *Sosiologi Sistematis Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Nurhidayah, R.E. 2003. *Keperawatan dan Perubahan*. Makalah Tugas Akhir Pada Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan. Universitas Sumatera Utara.
- Lauer. Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Poloma, Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta : PT Etasa Dinamika.